



Jurnal Ilmiah Aset
Vol. 25 No.2
September 2023
p-ISSN 1693-928X
e-ISSN 2685-9629

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Hermawan Triono

Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro
Email: cindeutararumah@gmail.com

Abstract : *The research aims to analyze the effect of economic growth, local revenue, general allocation funds, specific allocation funds on capital expenditure budget of Central Java Province during the period 2018-2022. Capital Expenditure as a dependent variable and economic growth, local revenue, general allocation funds, specific allocation funds as independent variables. The population that was used in this research governments in Central Java for the period 2018-2020. Samples from 35 cities/districts in Central Java were taken using the census technique. Census or saturated sampling is a sampling technique when all members of the population is used as samples. This research uses a quantitative type of data and a secondary source of data that obtains data over three years between 2018 and 2020 with a total of 105 data observations. The study uses SPSS data processing tools and analyzing data with a multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that economic growth and special allocation funds have a negative effect on capital expenditures. Local revenue and general allocation funds have a positive effect on capital expenditures.*

hal. 139 -145
DOI: 10.37470/1.25.2.225

Diterima 08 Agustus 2023
Disetujui 23 Agustus 2023

Keywords: *Economic Growth, Local Own-Source Revenue, General Allocation Funds, Specific Allocation Funds, Cost of Equity.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menurut UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah dalam mengatur rumah tangganya juga meliputi wewenang daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rancangan pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat serta menjadi dasar bagi pemerintah daerah guna memberi pelayanan yang baik untuk masyarakat. Semua pendapatan serta belanja pemerintah daerah yang didalamnya merupakan uang, barang dan jasa selama masa anggaran dan dilampirkan dalam APBD. (Suryani & Pariani, 2018) Peraturan Pemerintah No. 58 2008, APBD ialah susunan pembiayaan daerah tahunan yang dibahas serta disepakati oleh pemerintah daerah dan DPRD serta diputuskan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku di daerahnya.

Berdasarkan UU No 32 th 2004 proses dalam anggaran mengikutsertakan pihak pemerintah daerah legislatif (DPRD) yang keduanya adalah dari panitia anggaran. Bagian eksekutif bertanggung

jawab untuk melaksanakan operasional daerah, yang merupakan tanggung jawab penyusunan APBD. Pada saat yang sama, tugas legislatif adalah menyetujui rancangan APBD dalam proses persetujuan anggaran.

Salah satu poin yang diusulkan dalam APBD adalah Anggaran Belanja Modal. Anggaran Belanja Modal merupakan anggaran yang akan digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pelaksanaan belanja modal sangat penting bagi daerah, karena membantu meningkatkan pembangunan daerah dan memenuhi pelayanan publik yang lebih baik.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Teori keagenan muncul akibat dari kontrak kerja atas persetujuan bersama yang berasal antara agent serta principal. Agen yakni pihak yang melakukan tugas-tugas yang telah ditentukan pihak prinsipal-prinsipal, namun prinsipal ialah pihak yang memberikan bayaran pada pihak agen. Keterlibatan teori keagenan

(agency theory) pada penelitian ini bisa diamati pada hubungan antara pemerintah daerah (agents) serta masyarakatnya (principals). Hubungan ini memunculkan suatu kontrak antara masyarakat maupun pemerintah daerah. Hubungan kontrak ini dapat memunculkan adanya konflik kepentingan (conflict of interest) antar pihak masyarakat serta pemerintah daerah. Pemerintahan di Indonesia sudah mempraktekkan teori agensi sejak lama. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud prinsipal yakni rakyat serta agen pemerintah pada hal ini ialah pemerintah daerah dan aparat daerah lainnya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 th 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan menjelaskan deskripsi mengenai terdapatnya kejelasan hubungan antara teori agensi dan akuntabilitas.

Belanja Modal

Belanja modal ialah seluruh pembiayaan pengeluaran yang mendukung terlaksananya pengadaan, pembelian ataupun penyedia aset tetap dalam kurun waktu lebih dari satu tahun yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Belanja modal menggunakan aset tetap pemerintah daerah sebagai prioritas kebutuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan aset tetap, pemerintah daerah mengalokasikan dananya pada wujud anggaran belanja modal pada APBD. Pemerintah daerah setiap tahunnya membeli aset tetap berdasarkan prioritas anggaran dan memberikan dampak pembiayaan jangka panjang untuk pelayanan publik (Sari, 2017)

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi ialah meningkatnya sebuah kapabilitas negara dalam mengadakan berbagai macam jenis barang ekonomi kepada masyarakatnya dalam jangka yang panjang. Ukuran terpenting konsep ekonomi yakni produk domestik bruto (PDB) untuk menafsir nilai total barang atau jasa yang diproduksi oleh negaranya. PDRB digunakan bakal menaksir nilai total barang serta jasa secara lokal yang diproduksi. Menurut

pemahaman tersebut, peneliti memakai PDRB menjadi alat ukur guna mengevaluasi partumbuhann ekonomi. (Suprayitno, 2015)

Pendapatan Asli Daerah

Mengacu pada UU No 33 th 2004, pendapatan asli daerah menggambarkan asal pendapatan asli daerah yang dialokasikan guna modal dasar pemerintah daerah demi mendanai pembangunan & upaya mengurangi bergantungnya dana dari pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah (PAD) ialah perolehan daerah pada berbagai sumber di wilayahnya yang dipungut serta didasarkan peraturan daerah yang disesuaikan melalui peraturan. Kawasan melalui sarana prasarana yang layak mampu memikat investor agar menyuntikkan modalnya di kawasan tersebut sehingga PAD turut meningkat. (Syukri M, Hinayah H, 2019)

Dana Alokasi Umum

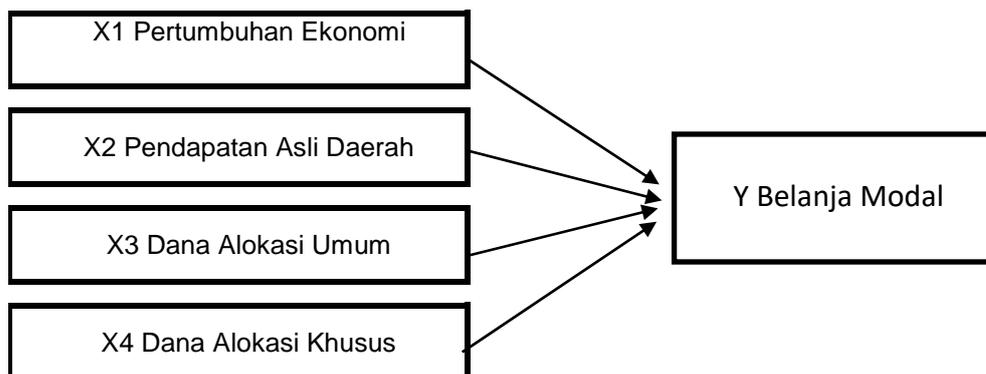
Dana alokasi umum ialah anggaran yang didapat dari APBN serta mempunyai kegunaan untuk menyalurkan dana tiap daerah secara adil guna menyediakan dana untuk kebutuhan belanja daerahnya pada rangka pelaksanaan desentralisasi (PP No. 55/2005) DAU ialah anggaran berasal pada APBN serta dialokasikan guna tujuan pemerataan kapabilitas finansial antar daerah dalam membiayai keperluan daerah pada rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No 33 th 2004).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dana alokasi umum ialah jumlah anggaran yang didapat pada APBN serta didistribusikan secara adil guna tujuan pemerataan kapabilitas finansial tiap daerah dalam membiayai keperluan daerah sebagai rangka melaksanakan desentralisasi.

Dana Alokasi Khusus

Menurut UU No 33 th 2004, Dana alokasi Khusus ialah jumlah anggaran yang didapatkan pada APBN serta didistribusikan ke daerahnya, yang bertujuan guna membantu penyediaan dana untuk kegiatan khusus yang merupakan misi nasional serta sejalan dengan prioritas nasional.

Gambar 1
Kerangka Teoretis



Hipotesis Penelitian

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini meliputi:

- H1: Perumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja Modal
 H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal
 H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Belanja Modal
 H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Teknik sampling penelitian ini menggunakan metode sensus. Metode sensus atau sampling jenuh ialah cara menentukan sampel bila keseluruhan anggota populasi dipakai guna sampel. Sampel dalam penelitian ini ialah keseluruhan wilayah kota serta kabupaten pada Jawa Tengah. Sampel data yang digunakan ialah data Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU dan DAK pemerintah kota / kabupaten pada Jawa Tengah berjumlah 35 kota/kabupaten. Dari tahun 2018-2020. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi $3 \times 35 = 105$ data.

Definisi Operasional dan Perhitungan Variabel Variabel Dependen (Y): Belanja Modal

Menurut PP No. 71/2010, belanja modal ialah belanja anggaran guna pembelian aset tetap erta aset lainnya yang memberikan pendapatan selama beberapa periode akuntansi. Belanja modal mencangkupi belanja modal guna pemerolehan tanah, gedung dertaan bangunan, peralatan maupun aset tak berwujud. Indikator variabel belanja modal dihitung dengan:

Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, irigasi dan Jaringan + Belanja Aset tetap lainnya.

Variabel Independen (X1) : Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses peningkatan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi adalah pengukuran kuantitatif yang mendeskripsikan perkembangan perekonomian daerah pada suatu tahunan tertentu. Pertumbuhan Ekonomi dapat dihitung melalui rumus:

Pertumbuhan Ekonomi [Gt]: $[(PBD_t - PBD_{t-1}) / PBD_{t-1}] \times 100\%$

PBD_t = Nilai PDB periode t

PBD_{t-1} = Nilai PDB periode sebelumnya

Variabel Independen (X2) : Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU No. 33 th 2004, pendapatan asli daerah ialah pendapatan yang didapatkan dari dalam daerahnya sendiri, dan penerimaan tersebut ditarik sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pendapatan daerah primitif adalah sumber pendapatan dari daerah primitif yang merupakan hasil penggalian pendapatan di

daerah dan dijadikan suatu modal dasar pemerintah daerah guna membiayai pembangunan serta upaya daerah dalam mengurangi ketergantungan dana pada pemerintah pusat. Pendapatan asli daerah meliputi pajak daerah, pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, serta pendapatan daerah legal lainnya. Variabel Pendapatan asli daerah diukur melalui rumus:

$PAD = Pajak\ Daerah + Retribusi\ Daerah + Hasil\ Pengelolaan\ Kekayaan\ Daerah\ yang\ Dipisahkan + lain-lain\ PAD\ yang\ sah$

Variabel Independen (X3): Dana Alokasi Umum

Dana alokasi Umum (DAU) ialah dana umum yang didapat pada pemerintah pusat untuk pemerintah daerah guna menangani masalah kesenjangan horizontal yang tujuan utamanya ialah mencapai kapasitas proporsi pembiayaan yang sama antar daerahnya. Dari posisi dan perimbangan dalam laporan realisasi APBD dapat dilihat alokasi dana secara umum dalam masing-masing kabupaten ataupun kota. Variabel DAU daerah diukur dengan rumus:

$DAU = Alokasi\ Dasar + Celah\ Fiskal$

Variabel Independen (X4): Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi Khusus ialah anggaran yang dialokasikan pada APBN untuk daerah tertentu guna mendukung membiayai kegiatan khusus urusan daerahnya serta sejalan dengan prioritas nasional. Dari posisi dana perimbangan dalam Laporan realisasi APBD, Anda dapat melihat dana alokasi khusus di tiap kabupaten / kota. DAK dapat didapatkan menggunakan rumus:

$DAK = PU\ APBD - Belanja\ Pegawai\ Daerah$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tabel 1 statistik deskriptif menunjukkan nilai rata-rata pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan khusus memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding nilai standar deviasinya dari masing-masing variabel, Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Belanja Modal memiliki tingkat penyimpangan yang rendah.

Berdasarkan uji asumsi klasik yang sudah dilakukan, data penelitian dinyatakan lolos uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Dari tabel 2 dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$Y = a + b_1.X_1 + b_2.X_2 + b_3.X_3 + b_4.X_4 + e$

$Y = 40270318082.372 - 1441946150904.608 X_1 + 0.462X_2 + 0.312X_3 - 0.228X_4 + e$

Dari persamaan regresi linear berganda tersebut maka dapat diketahui:

1. Nilai konstanta senilai 40270318082.372 pada persamaan regresi menggambarkan bahwa jika nilai variabel Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, dan DAK tidak mengalami kenaikan atau nol, maka ada kecenderungan bahwa Belanja

- Modal mengalami kenaikan sebesar 40270318082.372.
- Koefisien regresi Pertumbuhan Ekonomi X1 sebesar -1441946150904.608 dan memiliki arah negatif terhadap Belanja Modal, setiap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 satuan maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 1441946150904.608.
 - Koefisien regresi PAD X2 sebesar 0.462 dan memiliki arah positif terhadap Belanja Modal, setiap peningkatan PAD sebesar 1 satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.462.
 - Koefisien regresi DAU X3 sebesar 0.312 dan memiliki arah positif terhadap Belanja Modal, setiap peningkatan DAU sebesar 1 satuan maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0.312.
 - Koefisien regresi DAK X4 sebesar -0.228 dan memiliki arah yang negatif terhadap Belanja Modal, setiap peningkatan DAK sebesar 1 satuan maka Belanja Modal akan mengalami penurunan sebesar 0.228.

Uji T

Pada tabel 1 bisa dijelaskan bahwa pada variabel Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki signifikansi $> 0,05$ yang artinya tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Pada variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki signifikansi $< 0,05$ sehingga berpengaruh terhadap Belanja Modal.

Berdasarkan tabel 3 uji F menunjukkan hasil bahwa nilai F hitung senilai 65.990 dengan taraf

signifikansi senilai 0.000 yang dimana nilai tersebut memperlihatkan hasil yang lebih rendah dari $< 0,05$ maka dapat ditarik hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, DAK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal

Pengujian statistik pada variabel Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.157 yang memperlihatkan bahwa nilai signifikansi Pertumbuhan Ekonomi lebih besar dibandingkan taraf signifikansi normal yaitu sebesar 0.05 yang menjelaskan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak mempengaruhi Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Hal ini karena pada dasarnya apabila Pertumbuhan Ekonomi Daerah terus meningkat tiap tahunnya dengan cukup besar dan stabil, maka tentu akan berpengaruh terhadap perkembangan korporasi dan industri pada daerah tersebut. Dengan semakin berkembangnya industri maka CSR dari korporasi tersebut biasanya lebih banyak dialokasikan pada pembangunan infrastruktur yang juga semakin meningkat, maka Pemerintah Daerah tidak menjadikan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Belanja Modal pada APBD.

Tabel 1
Analisis Statistik Deskriptif

| Descriptive Statistics | | | | | |
|------------------------|-----|--------------|---------------|-----------------|------------------|
| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
| PERTUMBUHAN EKONOMI | 104 | .02 | .07 | .0547 | .00881 |
| PAD | 104 | 179224408698 | 2066333418588 | 397264810448.56 | 279177933808.300 |
| DAU | 104 | 440041244000 | 1437036239000 | 972196727074.81 | 250094883633.925 |
| DAK | 104 | 56452309000 | 477533051326 | 288838540851.93 | 105828227033.122 |
| BELANJA MODAL | 104 | 113622507976 | 1275359088966 | 395721395870.68 | 182710187869.944 |
| Valid N (listwise) | 104 | | | | |

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Tabel 2
Regresi Linear Berganda

| Coefficients ^a | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|---------------------------|--------|------|
| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
| | B | Std. Error | Beta | | |
| (Constant) | 40270318082.372 | 42250953927.193 | | .953 | .343 |
| lag_x1 | -1441946150904.608 | 1010238355819.085 | -.076 | -1.427 | .157 |
| lag_x2 | .426 | .046 | .637 | 9.353 | .000 |
| lag_x3 | .312 | .079 | .398 | 3.963 | .000 |
| lag_x4 | -.228 | .164 | -.123 | -1.388 | .168 |

a. Dependent Variable: lag_y1

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Tabel 3
Uji F

| ANOVA ^a | | | | | |
|--------------------|-----------------------------------|-----|----------------------------------|--------|-------------------|
| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
| Regression | 17001389956960632000 00000.000 | 4 | 425034748924015800000 000.000 | 65.990 | .000 ^b |
| Residual | 63765001048921380000 0000.000 | 99 | 644090919686074500000 0.000 | | |
| Total | 23377890061852770000 00000.000 | 103 | | | |

a. Dependent Variable: lag_y1
b. Predictors: (Constant), lag_x4, lag_x1, lag_x2, lag_x3

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2021

Tidak berpengaruhnya Pertumbuhan Ekonomi tidak sesuai dengan Teori Agensi yang menyatakan Pertumbuhan ekonomi ialah jumlah yang memperlihatkan bahwa kegiatan ekonomi di daerah semakin meningkat maka Belanja Modal akan meningkat pula pertahunnya (Pangestu P, Riomy M, dll, 2019). Kewajiban pemerintah terhadap prinsipal ialah melalui anggaran belanja modalnya dapat memberikan pelayanan publik yang baik (*public service*). Pasalnya, infrastruktur atau infrastruktur yang memadai harus digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang baik guna mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Disisi lain, sarana prasarana diperoleh dari alokasi anggaran belanja modal yang ada dalam APBD setiap tahun.

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal tidak membawa dampak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan pada dasarnya dengan Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang terus meningkat tiap tahunnya dengan cukup besar dan stabil, maka tentu saja akan berpengaruh terhadap perkembangan korporasi dan juga industri pada daerah tersebut. Dengan semakin berkembangnya industri maka CSR dari korporasi tersebut yang biasanya lebih banyak dialokasikan pada pembangunan infrastruktur yang juga semakin meningkat, sehingga Pemerintah Daerah tidak menjadikan Pertumbuhan Ekonomi Daerah sebagai acuan dalam penyusunan anggaran Belanja Modal pada APBD. Berdasarkan hal tersebut Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

Hasil dari riset ini menghasilkan hasil yang selaras dengan hasil riset dari Waskito,dkk (2019), Sari, Pungky (2007), Suprayitno (2015), Mundiroh (2019) dan Rudiansah (2017) yang mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengujian statistik pada variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang memperlihatkan bahwa nilai signifikansi Pendapatan Asli Daerah lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi normal yaitu sebesar 0.05 yang menjelaskan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal.

Artinya, semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi dalam penelitian ini, maka hal tersebut (PAD) akan berpengaruh terhadap jumlah belanja modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang diterima maka akan semakin tinggi pula jumlah Belanja Modal begitu pula sebaliknya jika semakin rendah Pendapatan Asli Daerah maka Belanja Modal akan semakin rendah.

Sejalan dengan Teori Agensi yang mengungkapkan bahwa adanya peningkatan PAD yang didapatkan suatu daerah maka terjadi peningkatan pula untuk alokasi Belanja Modal daerah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kewenangan Pemerintah Daerah dalam menerapkan kebijakan otonomi daerah yang akan semakin luas sejalan dengan peningkatan pendapatan. PAD merupakan penerimaan yang benar-benar bersumber pada potensi daerah tersebut.

Hasil dari riset ini menghasilkan hasil yang selaras dengan hasil riset dari Siti Mundiroh (2019), yang mengatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif serta signifikan terhadap alokasi belanja modal. Namun tidak sejalan pada penelitian Nugroho Suratno Putro (2009), yang menjelaskan dimana pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Modal

Pengujian statistik pada variabel Dana Alokasi Umum menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000 yang memperlihatkan bahwa nilai signifikansi Dana Alokasi Umum lebih kecil dibandingkan taraf signifikansi normal yaitu sebesar 0.05 yang menjelaskan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh positif serta signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Alokasi Umum berpengaruh dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Artinya, pada saat terjadi peningkatan jumlah Dana Alokasi Umum akan berpengaruh pada peningkatan jumlah Belanja Modal.

Sesuai dengan Teori Agensi yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum memiliki presentase yang cukup besar dibandingkan

penerimaan daerah lainnya. Jumlah ini mengindikasikan, bahwa Belanja Modal masih bergantung pada Transfer Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Transfer Dana Alokasi Umum bermaksud untuk mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah bilamana terjadi ketidakseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran suatu daerah.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hairiyah, Lewi Malisan Dan Zaki Fakhroni (2017), yang menyatakan bahwa dana aloaksi umum berpengaruh negative terhadap belanja modal. Akan tetapi sejalan dengan penelitian Suryana (2018), yang menyatakan dana aloaksi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal

Berdasarkan pengujian statistik terhadap variabel dana alokasi khusus menunjukkan bahwa nilai signifikansi dari variabel dana alokasi khusus adalah 0,168 yang memperlihatkan bahwa nilai signifikansi Dana Alokasi khusus lebih besar dibandingkan taraf signifikansi normal yaitu sebesar 0.05 yang berarti dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Artinya apabila Dana Alokasi Khusus mengalami kenaikan maka tidak diikuti oleh peningkatan Belanja Modal. Semakin tinggi atau rendah Dana Aloksi Khusus, maka belum tentu menaikkan atau menurunkan Belanja Modal.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Kabupaten/Kota yang mendapatkan DAK berapapun jumlahnya tidak akan mempengaruhi belanja modal yang dimana bertolak belakang dengan Teori Agensi yang menyatakan DAK bertujuan mengurangi biaya acara khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah terhadap prinsipal yaitu dalam peningkatan *public service*.

Namun, Daerah mengalokasikan DAK bukan untuk membiayai barang-barang modal hal ini tentunya sesuai dengan peruntukan DAK. Dimana DAK merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Pengalokasian DAK memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN, yang berarti bahwa besaran DAK tidak dapat dipastikan setiap tahunnya karena DAK hanya diberikan kepada daerah apabila daerah menghadapi masalah-masalah khusus. Berdasarkan hal tersebut besar kecilnya Dana Alokasi Khusus tidak meningkatkan Belanja Modal secara signifikan dikarenakan Dana Alokasi Khusus hanya digunakan untuk kepentingan yang bersifat Khusus. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2014), yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Akan tetapi tidak sejalan dengan penelitian Hairiyah, Lewi Malisan Dan Zaki Fakhroni (2017)

yang menyatakan dana alokasi khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal.

SIMPULAN

Berlandaskan dari observasi yang telah dikerjakan melalui berbagai tahapan seperti tahap mengumpulkan data, mengolah data, menganalisa data serta yang terakhir menginterpretasikan hasil analisis mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAK dan DAU terhadap belanja modal dengan penggunaan data yang terdistribusi secara normal, terbebas dari multikolinearitas, terbebas dari autokorelasi dan tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, maka didapatkan hasil kesimpulan:

Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020. Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2020.

Dana alokasi umum memiliki pengaruh terhadap belanja modal pada Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2020.

Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal pada provinsi Jawa Tengah periode 2018-2020.

Hasil dari uji R² Square dalam riset ini memperoleh hasil adjusted R square yakni sebesar 0,727 yang berarti 72,7% variabel terikat yakni nilai perusahaan dapat diinterpretasikan oleh empat variabel bebas yakni pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU dan DAK selebihnya 27,3% belanja modal dijelaskan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilakukan sesuai pada prosedur ilmiah, tetapi tidak luput masih mempunyai keterbatasan dalam penelitian ini, antara lainnya: Penelitian ini hanya menggunakan 3 periode tahun dan memiliki zona dan variabel yang terbatas

Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode tahun lebih lama, menambahkan variabel yang lebih lengkap dan memperluas wilayah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Suprayitno. (2015). *Jurnal Akutansi*. 9. Bambang Suprayitno. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal*, 106-12.
- Ferdiansyahi, D.d. (2018). *Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah*. Inovasi, 44.
- Hairiyah H, Malisan L, fakhrozi Z. (2018). *Pengaruh dana alokasi umum DAU dan alokasi khusus*

- DAK dan pendapatan asli daerah PAD terhadap belanja modal. *Kinerja*, 85.
- Juniawan, Made Ari, Ni Putu Santi Suryantini,. (2018). *E-Jurnal Manajemen, Universitas Udayana Bali Indonesia*, Vol. 7, No. 3. ISSN. "Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali", 2302-8912 .
- .PangestuP,RiamyM,dll.(2019).*JurnalAkutansiKeuangan.PengaruhPendapatanAsliDaerah danDanaAlokasiUmumTerhadapPengalokasianAnggaranBelanjaModal*,26-32.
- R, N. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus , 5-9.
- Rumefi U. (2018). *Jurnal Ilmu Manajemen. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur)*, 30-122.
- S, M. (2019). *Jurnal Akutansi. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap alokasi belanja modal Daerah*, 104.
- SariP.(2017).*JurnalAccountGlobal.PengaruhPendapatanAsliDaerah,DanaAlokasiKhusus Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*, 1745-73.
- Sukendri E. (2018). *Jurnal Akutansi Keuangan*. Vol 12.
- Suryana. (2020). *Jurnal Ilmu Manajemen Bisnis. Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Belanja Modal*, 67-74.
- Suryani F, Pariani E. (2018). *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akutansi. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau*, 11-22.
- Syukri M, Hinayah H. (2019). *Jurnal Ekonomi managen Accounting. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & KotaProvinsi Sulawesi Selatan*, 30.
- Tari N. (2016). *The Influence of Economic Growth, Local Revenue, and General*, 736--44.
- Waskito,Z.R.(2019).*PengaruhPertumbuhanEkonomi,PendapatanAsliDaerah,DanaAlokasiUmum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal(Studi pada Pemerintah Kabupaten & Pemerintah Kota di Provinsi Aceh)*,38-220.